



Kesenjangan Representasi Politik Perempuan: Analisis Gender di Tingkat Desa dan Kota

Annisa Ismaida Batubara*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Deli Sedang, Indonesia, 20371

Email: annisabatubara3@gmail.com

Histori	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
Naskah	02 Juli 2025	13 September 2025	17 September 2025	28 September 2025

Abstract

The gap in women's political representation at the village and city levels remains a crucial issue in Indonesian democratic discourse, as women's representation does not fully reflect the principle of gender equality. Although regulations such as a 30 percent quota for women's representation have been established, their implementation is often merely formal. It does not translate into increased participation by women in decision-making structures. This study aims to analyze the factors influencing the gap in women's political representation by comparing conditions at the village and city levels through a gender analysis perspective. The research method employed is a qualitative descriptive approach, utilizing a library-based approach that incorporates secondary data from academic literature, research reports, government regulations, and statistical data related to women's political involvement. The results indicate that the gap in women's representation at the village level is more influenced by a strong patriarchal culture, low access to political education, and the dominance of local elites that limit women's freedom of movement. Meanwhile, at the city level, obstacles are more caused by transactional political practices, the dominance of economic capital, and institutional biases within the still masculine structure of political parties. However, there are also opportunities at both levels, such as increased public awareness of the importance of women's political participation, the presence of women's organizational networks, and regulatory support that encourages more equitable representation. The research conclusion confirms that the gap in women's political representation is a multidimensional problem that requires intervention through political education, party reform, and strengthening of affirmative regulations so that gender equality in politics can be realized substantively.

Keywords: Women's Political Representation; Gender Gap; Political Participation; Villages and Cities; Affirmative Action Policies

Abstrak

Kesenjangan representasi politik perempuan di tingkat desa dan kota masih menjadi isu penting dalam diskursus demokrasi Indonesia karena keterwakilan perempuan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Meskipun regulasi seperti kuota 30 persen keterwakilan perempuan telah diatur, implementasinya sering kali hanya bersifat formalitas dan tidak berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam struktur pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan representasi politik perempuan dengan membandingkan kondisi di tingkat desa dan kota melalui perspektif analisis gender. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan, menggunakan data

Corresponding author: annisabatubara3@gmail.com*

Copyright (c) 2025 The Author. Published by Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial dan Multidisiplin. This is an open access article under a [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). 

sekunder dari literatur akademik, laporan penelitian, regulasi pemerintah, serta data statistik terkait keterlibatan politik perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan representasi perempuan di tingkat desa lebih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang kuat, rendahnya akses pendidikan politik, serta dominasi elite lokal yang membatasi ruang gerak perempuan. Sementara itu, di tingkat kota, kendala lebih banyak disebabkan oleh praktik politik transaksional, dominasi modal ekonomi, dan bias institusional dalam struktur partai politik yang masih maskulin. Namun, terdapat juga peluang di kedua tingkat, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik perempuan, hadirnya jaringan organisasi perempuan, serta dukungan regulasi yang mendorong keterwakilan lebih adil. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kesenjangan representasi politik perempuan merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan intervensi melalui pendidikan politik, reformasi partai, dan penguatan regulasi afirmatif agar kesetaraan gender dalam politik dapat terwujud secara substantif.

Kata Kunci: Representasi Politik Perempuan; Kesenjangan Gender; Partisipasi Politik; Desa dan Kota; Kebijakan Afirmatif

Pendahuluan

Representasi politik perempuan masih menjadi isu strategis dalam wacana pembangunan demokrasi di Indonesia. Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan melalui kebijakan afirmasi berupa kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen, realitas di tingkat desa maupun kota menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan belum seimbang dengan laki-laki (Novida, Manik, & Ekayanta, 2024). Kesenjangan ini tampak jelas melalui minimnya jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis di pemerintahan desa, kelurahan, maupun lembaga legislatif daerah (McLaren, Star, & Widianingsih, 2019). Kondisi tersebut tidak hanya menunjukkan adanya hambatan struktural dan kultural, tetapi juga menegaskan adanya persoalan mendasar mengenai keadilan gender dalam ranah politik yang semestinya menjadi ruang partisipasi setara bagi seluruh warga negara.

Fenomena rendahnya representasi perempuan di tingkat lokal memunculkan masalah serius bagi keberlangsungan demokrasi. Politik seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan bahwa semua kelompok sosial, termasuk perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi kebijakan publik (McCall, 2016). Namun, dalam praktiknya, perempuan lebih sering terpinggirkan baik karena dominasi budaya patriarkal, keterbatasan akses pendidikan politik, maupun minimnya dukungan institusional (Siregar, 2025). Fenomena ini lebih tampak di tingkat desa yang masih sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal dan peran gender yang konservatif, sehingga kehadiran perempuan dalam ruang politik sering dianggap tidak sesuai dengan kodrat sosialnya. Di perkotaan, meskipun akses pendidikan dan informasi lebih terbuka, partisipasi perempuan tetap terhambat oleh beban ganda, stereotip sosial, dan struktur politik yang masih berorientasi maskulin (Firdaus, Artina, Rauf, Separen, & Wijaya, 2024).

Fakta empiris menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih jauh dari ideal. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2019 menunjukkan keterwakilan perempuan di DPR RI hanya mencapai 20,5 persen, sementara di tingkat DPRD provinsi 18,2 persen, dan DPRD kabupaten/kota 14 persen. Angka tersebut menggambarkan semakin rendah tingkat pemerintahan, semakin rendah pula keterwakilan perempuan. Kondisi lebih mencolok terjadi di tingkat desa, di mana jumlah kepala desa perempuan sangat minim, bahkan tidak sampai 10 persen dari total kepala desa di Indonesia menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara idealitas kebijakan afirmasi dengan realitas implementasi di lapangan.

Kajian mengenai kesenjangan representasi politik perempuan telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar masih menekankan pada level nasional atau legislatif sehingga belum menyinggung secara mendalam perbedaan di tingkat desa dan kota. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Jovani (2020) menunjukkan keterwakilan perempuan di parlemen daerah masih sangat rendah karena dominasi budaya patriarkal dan lemahnya dukungan partai politik. Penelitian Aspinall, White, dan Savirani (2021) mengungkap bahwa perempuan di desa lebih sulit menembus arena politik dibandingkan perempuan di kota akibat keterbatasan akses pendidikan dan jaringan sosial. Sementara itu, kajian oleh Lestari, Gamaputra, dan Nuzula (2021) menyoroti program afirmasi melalui kuota 30% perempuan dalam partai politik belum efektif karena kerap dijadikan formalitas belaka. Penelitian lain oleh Igamo et al. (2024) menemukan perempuan perkotaan lebih mampu memanfaatkan modal sosial dan digitalisasi untuk memperkuat basis elektoral dibandingkan perempuan pedesaan. Selanjutnya, kajian oleh Suryani dan Wardana (2024) menekankan bahwa masih terjadi kesenjangan signifikan antara regulasi afirmatif dengan implementasi nyata di tingkat akar rumput. Dari kelima kajian tersebut, terlihat isu representasi perempuan telah dipetakan, tetapi belum ada penelitian yang secara komparatif menelaah secara khusus perbedaan dinamika politik gender di desa dan kota. Hal inilah yang menjadi kesenjangan penelitian dan memperlihatkan kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan masalah: apa penyebab kesenjangan representasi politik perempuan di tingkat desa dan kota, sejauh mana kebijakan afirmasi mampu menjembatani kesenjangan tersebut, serta strategi apa yang perlu dirumuskan untuk mendorong keterwakilan yang lebih setara? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis perbedaan struktural, kultural, dan institusional yang memengaruhi representasi politik perempuan di dua ranah sosial tersebut, sekaligus menemukan formulasi solusi yang kontekstual. Argumen awal yang mendasari pentingnya penelitian ini bahwa keberlanjutan demokrasi dan kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh kehadiran perempuan dalam politik, tetapi juga oleh kesetaraan kesempatan di

berbagai tingkatan wilayah. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperkaya wacana akademik tentang gender dan politik lokal, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, partai politik, serta organisasi masyarakat sipil untuk mendorong peningkatan representasi perempuan secara lebih inklusif dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data yang digunakan mencakup buku-buku akademik, artikel jurnal, laporan resmi lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, serta publikasi dari lembaga internasional yang berfokus pada isu representasi politik dan kesetaraan gender. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis teks, yakni dengan menyeleksi dan mengklasifikasi data sesuai dengan variabel penelitian, kemudian membandingkan temuan-temuan yang ada untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pola dan perbedaan representasi politik perempuan di tingkat desa dan kota. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif, sehingga setiap data yang diperoleh tidak hanya dipaparkan secara deskriptif, tetapi juga diinterpretasikan untuk menemukan kecenderungan, kesenjangan, serta faktor-faktor struktural dan kultural yang melatarbelakangi perbedaan representasi politik perempuan di dua level pemerintahan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Peta Representasi Politik Perempuan di Tingkat Desa dan Kota

Representasi politik perempuan pada tingkat desa dan kota memperlihatkan dinamika yang menarik sekaligus kompleks, mencerminkan pergeseran sosial maupun politik yang berlangsung di Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam politik di tingkat desa terlihat melalui peran mereka sebagai kepala desa maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan perempuan pada posisi ini seringkali masih menghadapi tantangan struktural, baik berupa stereotip gender, keterbatasan akses pendidikan politik, maupun dominasi budaya patriarkal yang menganggap kepemimpinan sebagai domain laki-laki (Aspinall et al., 2021). Meskipun demikian, semakin banyak perempuan mulai memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menduduki jabatan publik di desa, menandakan adanya perubahan cara pandang warga terhadap kapasitas perempuan sebagai pemimpin (Nalle, Lawalu, & Peten, 2024).

Kehadiran perempuan di BPD memperlihatkan variasi yang cukup beragam antarwilayah. Beberapa desa memiliki komitmen untuk memberikan ruang bagi perempuan, bahkan menetapkan kebijakan internal agar keterwakilan perempuan lebih terjamin. Namun, masih terdapat desa yang keterlibatan perempuannya sangat minim sehingga keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan warga belum sepenuhnya mempertimbangkan perspektif gender. Keanggotaan perempuan di

BPD sangat penting karena lembaga tersebut memiliki fungsi legislasi desa, pengawasan terhadap kinerja kepala desa, serta perumusan kebijakan pembangunan desa (Silberschmidt, Lee, Zanarini, & Schulz, 2015).

Kepemimpinan perempuan sebagai kepala desa juga menghadirkan realitas yang patut dicatat. Jumlah kepala desa perempuan masih tergolong rendah dibanding laki-laki, tetapi tren menunjukkan peningkatan secara bertahap. Kepercayaan warga terhadap perempuan sebagai kepala desa seringkali berkaitan dengan rekam jejak personal, keterlibatan dalam organisasi masyarakat, serta kemampuan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Keberhasilan kepala desa perempuan dalam mengelola program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat semakin memperkuat legitimasi sosial dan politik mereka (Daulay & Saladin, 2018). Fenomena ini mengindikasikan bahwa keterbukaan politik desa terhadap kepemimpinan perempuan mulai tumbuh meskipun secara kuantitatif belum signifikan.

Representasi politik perempuan di tingkat kota memperlihatkan kompleksitas yang lebih luas karena berkaitan dengan struktur kelembagaan formal, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun jabatan kepala daerah. Jumlah perempuan di DPRD kota cenderung meningkat seiring kebijakan afirmasi berupa kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan yang diatur dalam regulasi pemilu. Meskipun kebijakan tersebut tidak otomatis menghasilkan keterwakilan 30 persen di kursi DPRD, setidaknya memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk tampil sebagai kandidat (Tias, Nisrina, Destriputra, Al Putra, & Prakoso, 2023). Realitas empiris menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan di DPRD kota masih berada di bawah angka kuota, tetapi kontribusi mereka semakin terlihat terutama pada komisi atau bidang yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan sosial (Saputra & Rustiana, 2025).

Perbandingan antara tingkat desa dan kota menunjukkan perbedaan pola representasi politik perempuan. Desa memperlihatkan keterlibatan perempuan yang lebih berangkat dari legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat lokal, sedangkan kota lebih dipengaruhi oleh struktur formal, regulasi politik, serta dinamika partai. Jumlah kepala desa perempuan cenderung lebih sedikit dibanding anggota DPRD kota, tetapi peran mereka lebih langsung dirasakan masyarakat karena bersentuhan dengan kebutuhan sehari-hari warga desa. Sebaliknya, proporsi perempuan di DPRD kota lebih tinggi dibanding keanggotaan BPD perempuan, meskipun masih jauh dari ideal.

Secara keseluruhan, representasi politik perempuan di tingkat desa dan kota menunjukkan dinamika positif meskipun masih menghadapi tantangan serius. Proporsi jumlah perempuan di lembaga politik lokal belum setara dengan laki-laki, tetapi tren yang bergerak ke arah peningkatan membuka ruang optimisme. Perbandingan desa dan kota menegaskan bahwa meskipun arena politik berbeda,

kebutuhan akan kepemimpinan perempuan sama-sama mendesak demi tercapainya kebijakan publik yang adil, inklusif, dan responsif terhadap semua kelompok masyarakat.

Faktor Struktural dan Kultural Penyebab Kesenjangan

Kesenjangan representasi politik perempuan di tingkat desa dan kota tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural yang membentuk kerangka sistemik penyelenggaraan politik. Hambatan regulasi sering kali muncul ketika aturan hukum yang mengatur kuota perempuan atau afirmasi politik tidak sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Regulasi yang mengatur keterwakilan minimal perempuan dalam lembaga legislatif memang telah ada, namun implementasinya sering bersifat formalitas tanpa pengawasan ketat (Hillman, 2018). Sistem politik yang masih sarat kompetisi berbasis modal dan jaringan kekuasaan juga menyulitkan perempuan untuk masuk ke arena politik, terutama mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah (Aspinall et al., 2021). Kondisi tersebut semakin diperparah oleh akses pendidikan yang timpang, karena tingkat pendidikan perempuan di desa masih cenderung lebih rendah dibandingkan perempuan di kota. Tingkat literasi politik pun berbanding lurus dengan akses pendidikan, sehingga perempuan desa lebih terbatas dalam memahami mekanisme politik, strategi kampanye, maupun wacana kebijakan publik (Fitria et al., 2024).

Keterbatasan struktural tersebut berkelindan dengan faktor kultural yang bersifat lebih laten. Norma sosial yang berlaku di banyak komunitas masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga keikutsertaan mereka dalam politik sering dipandang sebagai sesuatu yang melampaui batas peran tradisional (Saepullah, 2021). Budaya patriarki yang mengakar kuat menjadikan politik dianggap sebagai ranah maskulin, tempat laki-laki diposisikan sebagai pemimpin alami. Kondisi ini mendorong terjadinya diskriminasi simbolik maupun nyata terhadap perempuan yang berupaya masuk ke dunia politik (Adriani & Maulia, 2024). Peran domestik yang dilekatkan pada perempuan, seperti kewajiban mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, semakin mempersempit ruang gerak mereka untuk beraktivitas di ranah publik (Siregar & Harahap, 2024). Masyarakat sering kali masih menilai negatif perempuan yang lebih aktif di ranah politik dibandingkan di rumah tangga, sehingga tekanan sosial ini menambah beban psikologis dan mengurangi minat perempuan untuk tampil sebagai aktor politik (Siregar & Harahap, 2024).

Perbedaan kondisi struktural dan kultural tersebut tampak semakin nyata ketika dibandingkan antara konteks desa dan kota. Di wilayah desa, daya dukung institusional terhadap keterlibatan perempuan dalam politik masih sangat terbatas. Organisasi perempuan sering hanya bergerak dalam ranah sosial kemasyarakatan, seperti kegiatan keagamaan atau sosial, dan jarang memiliki orientasi politik yang kuat. Lembaga desa sendiri sering dikuasai oleh elit lokal yang didominasi laki-laki, sehingga partisipasi perempuan hanya ditempatkan pada peran simbolik. Minimnya

jaringan dengan organisasi politik maupun lembaga swadaya masyarakat membuat perempuan desa semakin kesulitan memperoleh dukungan struktural yang dapat mengantarkan mereka ke ruang representasi politik formal (Bahar, Harnadi, & Sa'diyah, 2022). Berbeda dengan kota, perempuan memiliki peluang lebih besar karena tersedianya organisasi perempuan yang lebih terstruktur, akses ke partai politik yang lebih terbuka, serta ruang publik yang memungkinkan mereka mengembangkan kapasitas kepemimpinan politik (Goyal, 2024).

Penting untuk dicermati bahwa hambatan struktural dan kultural tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memperkuat. Regulasi yang lemah memperkuat dominasi budaya patriarki karena tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi keterlibatan politik perempuan (Suryani & Wardana, 2024). Pada saat yang sama, norma sosial yang membatasi perempuan memperlemah implementasi regulasi, sebab masyarakat sendiri tidak melihat pentingnya keterwakilan politik yang setara (Jayachandran, 2021). Kombinasi faktor ini menyebabkan perempuan desa menghadapi hambatan berlapis: keterbatasan pendidikan, minimnya dukungan institusional, serta tekanan budaya yang kuat. Sementara itu, perempuan kota relatif lebih mudah menembus ruang politik, meskipun tetap harus berhadapan dengan stereotip gender dan beban ganda peran domestik.

Keterlibatan negara dan partai politik menjadi faktor penting untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Negara melalui kebijakan afirmasi tidak hanya perlu menekankan angka keterwakilan, tetapi juga memastikan proses rekrutmen politik berlangsung adil bagi perempuan dari desa maupun kota (Anggraini, Havifi, Sari, & Gunawan, 2024). Partai politik sebagai pintu utama rekrutmen harus lebih aktif membuka ruang partisipasi perempuan, bukan sekadar memenuhi kuota, melainkan memberikan ruang nyata untuk berkompetisi (Goyal, 2024). Hanya dengan sinergi antara perbaikan regulasi, perubahan norma sosial, serta penguatan kapasitas perempuan desa dan kota, kesenjangan representasi politik dapat dikurangi sehingga tercapai sistem politik yang lebih inklusif dan adil gender.

Dinamika Pengalaman Politik Perempuan di Desa dan Kota

Pengalaman politik perempuan di desa dan kota memperlihatkan dinamika yang kompleks, karena kedua ruang sosial ini menghadirkan tantangan, peluang, serta mekanisme yang berbeda dalam proses keterlibatan perempuan. Lingkungan desa cenderung menempatkan perempuan dalam arena kepemimpinan berbasis komunitas, di mana kedekatan emosional, ikatan kekerabatan, dan solidaritas sosial menjadi modal utama untuk membangun legitimasi kepemimpinan. Situasi tersebut membuat perempuan lebih mudah diterima karena dinilai mampu mengelola hubungan sosial dan menjaga harmoni kolektif (Maranzan, Sabourin, & Simard-Chicago, 2013). Sementara itu, arena politik kota memperlihatkan kecenderungan lebih formal, birokratis, dan transaksional, sehingga partisipasi perempuan menuntut kemampuan negosiasi politik, modal finansial, dan akses jaringan yang

lebih luas agar mampu bersaing dengan aktor laki-laki yang mendominasi ruang politik perkotaan (Lekkas & Souitaris, 2022).

Konteks desa memperlihatkan bahwa modal sosial memiliki peran signifikan bagi perempuan. Kegiatan-kegiatan kolektif seperti arisan, kelompok tani, pengajian, atau organisasi perempuan desa sering menjadi sarana awal perempuan membangun pengaruh politik. Basis legitimasi dibentuk melalui kapasitas mengayomi, membina, dan menghubungkan warga dalam ikatan sosial yang erat. Modal kultural berupa pengetahuan lokal dan kemampuan mengartikulasikan aspirasi masyarakat desa menambah legitimasi perempuan sebagai pemimpin komunitas (Khalil, Jacobs, & McKenna, 2021). Kondisi tersebut memungkinkan perempuan tampil sebagai aktor politik yang lebih menekankan etika kebersamaan dan nilai gotong royong dibandingkan praktik transaksional yang dominan di ruang kota.

Realitas politik kota menuntut perempuan bergerak dalam ranah yang lebih kompetitif, dengan tekanan yang kuat terhadap penggunaan sumber daya finansial dan simbolik. Partai politik, media, serta sistem pemilihan yang sangat formal menempatkan perempuan pada situasi yang memerlukan strategi adaptif yang berbeda (Goyal, 2024). Akses ke sumber daya finansial sering kali menjadi kendala utama, sehingga perempuan di kota harus membangun jaringan dengan aktor-aktor politik, pengusaha, maupun komunitas strategis. Legitimasi tidak lagi hanya bertumpu pada hubungan emosional, melainkan pada kemampuan membangun citra publik, menguasai retorika politik, serta bernegosiasi dengan berbagai kepentingan (Neumeyer, Santos, Caetano, & Kalbfleisch, 2019). Tantangan ganda muncul karena selain menghadapi persaingan yang keras, perempuan juga sering berhadapan dengan stereotip gender yang mempertanyakan kapasitas kepemimpinan mereka (Nasir & Sartina, 2020).

Strategi adaptasi perempuan desa lebih menekankan konsolidasi sosial berbasis kepercayaan masyarakat. Mereka memanfaatkan simbol keibuan, pengabdian, serta kedekatan personal sebagai instrumen membangun dukungan. Adaptasi dilakukan dengan mengakomodasi nilai-nilai tradisi lokal yang menekankan moralitas, kearifan, dan integritas sosial. Dalam konteks resistensi, perempuan desa cenderung menghadapi hambatan berupa budaya patriarki yang masih kuat, sehingga resistensi mereka lebih banyak dimanifestasikan melalui pendekatan persuasif, membangun peran ganda sebagai ibu sekaligus pemimpin, dan memperlihatkan kemampuan menjaga stabilitas sosial agar kehadirannya dapat diterima (Marhumah, Lessy, Sya'rani, & Hidayah, 2023).

Berbeda dengan itu, strategi adaptasi perempuan kota menekankan profesionalisme, kemampuan komunikasi politik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Media sosial menjadi alat penting untuk membangun citra dan memperluas jangkauan dukungan (Harahap, Syahriza, & Faza, 2024). Perempuan kota sering menggunakan narasi kesetaraan gender, emansipasi, dan hak politik

sebagai basis legitimasi, sekaligus menunjukkan kapasitas teknokratis dalam pengambilan kebijakan. Resistensi terhadap diskriminasi gender di ruang kota lebih konfrontatif, karena perempuan sering menantang stereotip melalui wacana publik, advokasi, serta gerakan yang melibatkan organisasi masyarakat sipil (Zahan, 2020). Resistensi semacam itu memperlihatkan dinamika politik kota yang lebih terbuka bagi artikulasi kepentingan, meskipun tetap menuntut keberanian dan ketahanan menghadapi tekanan politik.

Perbedaan paling menonjol antara perempuan desa dan kota terletak pada pola legitimasi dan instrumen politik yang digunakan. Perempuan desa memperoleh dukungan melalui kedekatan sosial dan kultural, sedangkan perempuan kota harus mengandalkan mekanisme formal, institusional, dan berbasis sumber daya material (Evans, 2019). Relasi kekuasaan di desa lebih lentur karena diikat nilai-nilai tradisi yang dapat dinegosiasikan, sementara relasi kekuasaan di kota sangat terikat pada sistem formal yang menuntut kemampuan kompetitif (Huang & Xu, 2020). Hal ini membuat perempuan desa cenderung memanfaatkan ruang informal untuk menegosiasikan peran politik, sementara perempuan kota dipaksa masuk ke ruang formal yang penuh regulasi dan persaingan terbuka.

Kedua konteks ini menunjukkan bahwa pengalaman politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang membentuknya. Lingkungan desa memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk memimpin dengan basis nilai kekeluargaan, meskipun terbatas oleh norma patriarki yang kuat. Lingkungan kota memberikan peluang lebih luas dalam ranah formal dan legislatif, tetapi hambatan berupa modal finansial dan stigma gender menjadikan perjuangan perempuan lebih berat. Strategi adaptasi dan resistensi yang berbeda tersebut memperlihatkan politik perempuan tidak dapat disamaratakan, melainkan harus dipahami sesuai dengan arena sosial dan struktur kekuasaan yang melingkupinya.

Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik, baik di desa maupun di kota, tetap menghadapi tantangan patriarki, meskipun dalam bentuk dan intensitas yang berbeda. Keberhasilan perempuan menavigasi medan politik sangat bergantung pada kemampuan mereka membangun legitimasi sesuai konteks, memanfaatkan peluang, serta menghadapi hambatan dengan strategi adaptif maupun resistif. Analisis ini menegaskan pentingnya memahami pengalaman politik perempuan sebagai realitas yang beragam, sehingga kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan perlu mempertimbangkan perbedaan antara ruang desa dan kota agar mampu memberikan dampak yang lebih adil dan setara.

Strategi Penguatan Representasi Politik Perempuan

Penguatan representasi politik perempuan menjadi agenda strategis dalam pembangunan demokrasi yang berkeadilan. Representasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan tidak hanya berkaitan dengan kuantitas kehadiran, tetapi juga kualitas peran serta kontribusi yang dihadirkan. Kesenjangan dalam politik

mencerminkan terwujudnya prinsip partisipasi inklusif sekaligus menjawab ketimpangan yang masih berlangsung. Partisipasi perempuan tidak hanya mendukung legitimasi demokrasi, melainkan juga memastikan aspirasi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan memiliki ruang artikulasi dalam proses kebijakan publik. Kondisi ini menuntut adanya strategi komprehensif yang menyentuh aspek kapasitas individu, dukungan kelembagaan, hingga penguatan solidaritas kolektif.

Upaya peningkatan kapasitas politik perempuan menjadi fondasi utama dalam mendorong keterlibatan yang lebih substantif. Pendidikan politik yang terstruktur dan berkesinambungan akan membuka wawasan mengenai sistem politik, tata kelola pemerintahan, serta hak-hak politik yang melekat pada setiap warga negara (Agerberg, 2019). Pendidikan yang berbasis kesetaraan gender dapat melahirkan kesadaran kritis bahwa politik bukan domain eksklusif laki-laki, melainkan arena bersama yang harus diakses secara setara. Pelatihan menjadi instrumen lanjutan yang memberi keterampilan teknis seperti kemampuan berpidato, manajemen kampanye, komunikasi publik, serta penyusunan strategi politik (Bellani & Hidalgo-Hidalgo, 2025). Bekal keterampilan ini memberi perempuan daya tawar yang lebih kuat dalam kontestasi elektoral maupun dalam ruang legislatif.

Mentoring juga berperan penting sebagai jembatan transfer pengalaman antar generasi. Perempuan yang telah berhasil menempati jabatan politik dapat menjadi role model sekaligus mentor bagi generasi baru yang tengah merintis karier politik. Kehadiran mentor memberi dukungan moral, membangun kepercayaan diri, serta memberikan strategi praktis menghadapi dinamika politik yang kerap bersifat maskulin dan kompetitif. Jaringan mentoring menciptakan ekosistem yang saling menopang sehingga perempuan tidak merasa berjalan sendiri dalam ruang politik yang kompleks (Liu, 2018). Kombinasi antara pendidikan, pelatihan, dan mentoring menciptakan kerangka penguatan kapasitas yang utuh bagi perempuan.

Peran kebijakan afirmatif menjadi instrumen yang tidak dapat diabaikan dalam memperluas representasi politik perempuan. Kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif yang diatur melalui regulasi nasional merupakan pintu masuk penting. Kebijakan ini berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap diskriminasi struktural yang membatasi akses perempuan ke ruang politik formal. Kuota tidak hanya menciptakan peluang numerik, tetapi juga memberi sinyal politik bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan kebutuhan demokratis. Dukungan partai politik menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan afirmatif. Partai memiliki kewenangan strategis dalam menyusun daftar calon, memberikan posisi strategis, serta mengalokasikan sumber daya kampanye bagi kandidat perempuan (Beloshitzkaya, 2020).

Model pemberdayaan komunitas dan jaringan perempuan memiliki peran signifikan dalam membangun solidaritas kolektif. Pemberdayaan berbasis komunitas memungkinkan perempuan untuk mengartikulasikan kebutuhan lokal

serta mengintegrasikannya dengan agenda politik yang lebih luas (Sharma, Sharma, Bhargava, & Tak, 2024). Jaringan perempuan di pedesaan dapat mengorganisasi isu-isu spesifik seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sementara jaringan perempuan di perkotaan dapat mengangkat isu-isu struktural seperti ketenagakerjaan, kesetaraan ekonomi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Interaksi antara jaringan desa dan kota menciptakan sinergi yang memperluas basis gerakan perempuan.

Integrasi antara peningkatan kapasitas individu, kebijakan afirmatif, dan pemberdayaan komunitas menciptakan strategi penguatan representasi politik perempuan yang saling melengkapi. Pendidikan, pelatihan, dan mentoring memperkuat kemampuan personal; kuota 30 persen dan dukungan partai menciptakan ruang struktural; sementara jaringan komunitas membangun basis sosial. Sinergi ini menjawab persoalan multidimensional yang dihadapi perempuan dalam politik, mulai dari hambatan kultural, keterbatasan kapasitas, hingga dominasi struktur patriarki.

Keberhasilan penguatan representasi politik perempuan tidak hanya bergantung pada satu dimensi, melainkan pada keberlanjutan upaya lintas level. Komitmen pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal diperlukan untuk memastikan perempuan memiliki akses, kapasitas, dan dukungan yang memadai. Politik yang lebih setara akan melahirkan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi. Dengan demikian, strategi penguatan representasi politik perempuan menjadi keharusan yang tidak hanya menguntungkan perempuan, tetapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Penutup

Kesenjangan representasi politik perempuan di tingkat desa dan kota masih nyata dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, kultural, dan politik yang saling berkaitan. Di desa, keterwakilan perempuan umumnya terbatas pada posisi yang dekat dengan ranah sosial kemasyarakatan, sedangkan pada level kota perempuan menghadapi kompetisi politik yang lebih ketat dengan dominasi jaringan partai dan modal ekonomi. Faktor struktural berupa regulasi yang belum sepenuhnya berpihak, sistem pemilu yang masih menempatkan perempuan pada nomor urut tidak strategis, serta keterbatasan akses pendidikan dan sumber daya menjadi penghalang signifikan. Faktor kultural, seperti budaya patriarki yang masih kuat, pandangan bias gender terhadap peran domestik, serta lemahnya dukungan keluarga, memperdalam kesenjangan ini. Meskipun demikian, pengalaman politik perempuan menunjukkan adanya variasi strategi adaptasi, baik di desa dengan pendekatan berbasis komunitas maupun di kota melalui keterlibatan dalam jaringan formal dan dukungan organisasi. Upaya strategis untuk memperkuat representasi perempuan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas politik melalui pendidikan,

pelatihan, dan mentoring, optimalisasi kebijakan afirmatif seperti kuota 30 persen, serta pembangunan jejaring perempuan desa-kota yang lebih solid. Dengan demikian, penguatan representasi politik perempuan bukan hanya persoalan kuantitatif, tetapi juga transformasi kualitas kepemimpinan dan partisipasi demokratis yang inklusif.

Daftar Pustaka

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Agerberg, M. (2019). The Curse of Knowledge? Education, Corruption, and Politics. *Political Behavior*, 41(2), 369–399. <https://doi.org/10.1007/s11109-018-9455-7>
- Anggraini, D., Havifi, I., Puspika Sari, L., & Gunawan, A. (2024). Analyzing The Effectiveness of 30% Gender Affirmative Action Policy in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 9(23), 305–315. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i23.16731>
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Bahar, M. S., Harnadi, D., & Sa'diyah, Z. (2022). The Patriarchal Interpretation and the Political Participation of Rural Women in Bondowoso East Java. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 30(1), 184–207. <https://doi.org/10.19105/karsa.v30i1.5179>
- Bellani, L., & Hidalgo-Hidalgo, M. (2025). Bridging the gender gap: Women's education and political representation. *Economics of Education Review*, 104, 102605. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2024.102605>
- Beloshitzkaya, V. (2020). Affirmative gender equality policies in Central and Eastern Europe: Moving beyond the EU requirements. *Party Politics*, 27(5), 953–964. <https://doi.org/10.1177/1354068820906785>
- Daulay, H., & Ilham Saladin, T. (2018). Resilience of Women Leaders as Village Heads in Patriarchal Culture (Eco-feminist Analysis). *Proceedings of the 2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2017)*, 136(Icosop 2017), 144–149. <https://doi.org/10.2991/icosop-17.2018.22>
- Evans, A. (2019). How Cities Erode Gender Inequality: A New Theory and Evidence from Cambodia. *Gender & Society*, 33(6), 961–984. <https://doi.org/10.1177/0891243219865510>
- Firdaus, E., Artina, D., Rauf, M. A., Separen, S., & Wijaya, T. T. (2024). Has Women's Participation in Local Government Been Strengthened? A Legal and Political Analysis in Riau Province? *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 155–186. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4540>
- Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: evidence from Indonesia's rural areas. *BMC Public Health*, 24(1), 3323. <https://doi.org/10.1186/s12889->

024-20775-4

- Goyal, T. (2024). Representation from Below: How Women's Grassroots Party Activism Promotes Equal Political Participation. *American Political Science Review*, 118(3), 1415–1430. <https://doi.org/10.1017/S0003055423000953>
- Harahap, A. P., Syahriza, R., & Faza, A. M. (2024). The Transformation of Understanding Hadith in the Post-Multimedia Era: Balancing Technological Advancements with Tradition Preservation. *Jurnal Living Hadis*, 9(2), 1–21. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.5798>
- Hillman, B. (2018). The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(2), 322–338. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092>
- Huang, Q., & Xu, J. (2020). Understanding the Power Interactions between Villages and the State: Insights from Sand Mining Issues. *Asian Journal of Social Science*, 48(5–6), 567–587. <https://doi.org/10.1163/15685314-04805004>
- Igamo, A. M., Rachmat, R. Al, Siregar, M. I., Gariba, M. I., Cherono, V., Wahyuni, A. S., & Setiawan, B. (2024). Factors influencing Fintech adoption for women in the post-Covid-19 pandemic. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(1), 100236. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100236>
- Jayachandran, S. (2021). Social Norms as a Barrier to Women's Employment in Developing Countries. *IMF Economic Review*, 69(3), 576–595. <https://doi.org/10.1057/s41308-021-00140-w>
- Jovani, A. (2020). Women's Representation in Politics: Case Study of Women Legislative Member in Regional of Representatives Nusa Tenggara Timur Period of 2014-2019. *KnE Social Sciences*, 4(10), 367–376. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i10.7426>
- Khalil, M. B., Jacobs, B. C., & McKenna, K. (2021). Linking social capital and gender relationships in adaptation to a post-cyclone recovery context. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 66, 102601. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102601>
- Lekkas, C.-K., & Souitaris, V. (2022). Bureaucracy Meets Digital Reality: The unfolding of urban platforms in European municipal governments. *Organization Studies*, 44(10), 1649–1678. <https://doi.org/10.1177/01708406221130857>
- Lestari, Y., Gamaputra, G., & Nuzula, F. (2021). Problematics of Affirmative Action Policy Implementation of Women's Representation Quota in Surabaya City Election. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 9(2), 91–102. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i2.1580>
- Liu, S.-J. S. (2018). Are Female Political Leaders Role Models? Lessons from Asia. *Political Research Quarterly*, 71(2), 255–269. <https://doi.org/10.1177/1065912917745162>
- Maranzan, K. A., Sabourin, A., & Simard-Chicago, C. (2013). A community-based leadership development program for First Nations women: Revaluing and

- honoring women's strengths. *International Indigenous Policy Journal*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.18584/iipj.2013.4.2.5>
- Marhumah, M., Lessy, Z., Sya'rani, A. R., & Hidayah, S. N. (2023). The Teachers Perceptions on Misogynistic Hadiths: The Interpretations and It's Implications for Teaching Gender Equality. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 22(2), 132–148. <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.222.132-148>
- McCall, L. (2016). Political and Policy Responses to Problems of Inequality and Opportunity: Past, Present, and Future. In I. Kirsch & H. Braun (Eds.), *The Dynamics of Opportunity in America: Evidence and Perspectives* (pp. 415–442). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25991-8_12
- McLaren, H., Star, C., & Widianingsih, I. (2019). Indonesian women in public service leadership: A rapid review. *Social Sciences*, 8(11), 308. <https://doi.org/10.3390/socsci8110308>
- Muhammad Nasir, & Sartina. (2020). Peran Perempuan Dalam Wilayah Publik. *Pappasang*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.46870/jiat.v2i2.67>
- Nalle, G. D., Lawalu, S. P. A., & Peten, Y. Y. P. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan di Desa Pledo. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(3), 76–86. <https://doi.org/10.59024/jnb.v2i3.382>
- Neumeyer, X., Santos, S. C., Caetano, A., & Kalbfleisch, P. (2019). Entrepreneurship ecosystems and women entrepreneurs: a social capital and network approach. *Small Business Economics*, 53(2), 475–489. <https://doi.org/10.1007/s11187-018-9996-5>
- Novida, E., Manik, G., & Ekayanta, F. B. (2024). Women's Representation in Political Development in Indonesia: Examining Gender Discrimination and Patriarchal Culture. *Evolutionary Studies In Imaginative Culture*, 8(2), 228–241. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.683>
- Saepullah, A. (2021). Feminitas dan Dekonstruksi Perempuan dalam Islam: Studi Kasus Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd. *TAJID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 59–84. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i1.113>
- Saputra, M. R. A., & Rustiana. (2025). Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Samarinda 2024. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 4(2), 37–45. <https://doi.org/10.53622/ij3pei.v4i2.384>
- Sharma, S., Sharma, B., Bhargava, M., & Tak, K. (2024). Role Of Community Based Organisations In Women Empowerment In Rajasthan. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(3), 2400–2408. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.4161>
- Silberschmidt, A., Lee, S., Zanarini, M., & Schulz, S. C. (2015). Gender Differences in Borderline Personality Disorder: Results From a Multinational, Clinical Trial Sample. *Journal of Personality Disorders*, 29(6), 1–17. https://doi.org/10.1521/pedi_2014_28_175

- Siregar, I., & Harahap, A. P. (2024). Kontekstualisasi Hadis tentang Kurangnya Kecerdasan Perempuan dan Agama [Contextualization of the Hadith on the Lack of Women's Intelligence and Religion]. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 218–257. <https://doi.org/10.30631/tjd.v23i1.442>
- Siregar, K. N. (2025). Hadith Perspective on the Welfare Rights of Informal Workers: Challenges and Opportunities in the Digital Economy Era. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 96–113. <https://doi.org/10.64691/al-qarawiyyin.v1i2.24>
- Siregar, R. H., & Harahap, A. P. (2024). Keseimbangan Peran Perempuan Sebagai Ibu Dan Pekerja: Tinjauan Komprehensif Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis. *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 7(2), 133–150. <https://doi.org/10.51900/ias.v7i2.22741>
- Suryani, A. I., & Wardana, D. J. (2024). Legal Aspects of Women's Political Participation in a Gender Perspective. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1967–1981. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10634>
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169–189. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>
- Zahan, S. J. (2020). Feminist politicization of the urban: young female students challenging spatial patriarchies. *Space and Polity*, 24(1), 45–59. <https://doi.org/10.1080/13562576.2020.1720506>